Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA

Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024

Hanifah Putri Junaedi *, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, & Yenny Fitri Z
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
*Email Korespondensi: putrihanifah686@gmail.com

ABSTRACT
Community service activities aim to provide the community with a proper understanding of the law regarding the practice of money politics. The dissemination was conducted on February 8, 2024, at 2:00 PM local time at a coffee shop in Ibuh Village and on February 13, 2024, at 10:00 AM local time at Mitra Vocational School, West Payakumbuh Subdistrict, Payakumbuh City, West Sumatra Province. The purpose of the dissemination is to raise awareness among the community and first-time voters about the dangers of money politics, its forms, potential sanctions, and the process for reporting such criminal acts. The activity has successfully enhanced the community's understanding of the difficulty in proving money politics cases. Conclusions drawn from the community's perceptions include the majority acknowledging the existence of money politics, recognizing it as an electoral crime, and considering it a cultural norm in Indonesia. Factors influencing these perceptions include individuals' experiences with money politics, their knowledge of such practices, and the political climate during elections. While some respondents, particularly those under 20 years old, view money politics as a normal part of elections, they also realize its detrimental effects on the integrity of elections in Indonesia.

Keywords
Money Politics, Solutions, Public

BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 6, No.2, 2024, pp. 193-202
eISSN 2721-6381

Article History
Received : 3/17/2024 / Accepted : 4/4/2024/ First Published: : 4/7/2024

To cite this article
Junaedi, H. P., Wulandari, T., Utami, A. P., Putri, I. W., Putri, I. W., & Fitri Z, Y. (2024). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 193 - 202.

© The Author(s)2024
. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang hukum yang benar terkait praktik politik uang kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan pada 8 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di warung kopi Kelurahan Ibuh dan pada 13 Februari 2024 pukul 10.00 WIB di SMK Mitra, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan sosialisasi adalah agar masyarakat dan pemilih pemula memahami bahaya politik uang, bentuk-bentuknya, sanksi yang dapat diberikan, serta cara pelaporan tindak pidana politik uang. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesulitan membuktikan kasus politik uang. Kesimpulan dari persepsi masyarakat adalah mayoritas mengetahui praktik politik uang, menyadari bahwa itu adalah tindak pidana, dan menganggapnya sebagai budaya di Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat meliputi pengalaman individu terhadap politik uang, pengetahuan yang dimiliki tentang praktik politik uang, dan situasi saat Pemilu. Meskipun sebagian responden, terutama yang berusia di bawah 20 tahun, menganggap politik uang sebagai hal yang normal dalam pemilihan umum, mereka juga menyadari bahwa hal tersebut dapat merusak integritas pemilu di Indonesia.

Profil Penulis

Hanifah Putri Junaedi, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, Yenny Fitri Z
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Coresponding Author
: putrihanifah686@gmail.com

Kata Kunci: Politik Uang, Penyelesaian, Masyarakat

Reviewing Editor
Maya Mustika, STIE Indonesia Jakarta

PENDAHULUAN

Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 menyoroti tindak pidana politik uang dalam pemilu yang dapat dilihat dari diskusi publik mengenai politik uang. Tindak pidana politik uang dalam pemilu dapat dilihat dari perbincangan hangat masyarakat mengenai politik uang. Kata politik uang sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat, namun mengensai arti, maksud dan tujuannya masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat itu sendiri. Politik uang yang sering dikaitkan dengan praktik yang dikenal dengan istilah "vote buying" dalam sebuah transaksi, sehingga seorang individu, sekelompok individu, atau partai politik yang telah memberikan uang akan menerima uang dari pihak-pihak yang telah menerima uang tersebut. Sehinggga menjadi sebuah tanggung jawab bersama, terutama dikalangan mahasiswa hukum untuk lebih gencar memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait tindak pidana politik uang yang terjadi pada pemilu tahun 2024.

Biang utamanya politik uang pemilu di Indonesia adalah karena bangunan sistem pemilu yang diadopsi sealama ini adalah sistem proporsional dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (open list). Sistem ini pada gilirannya melahirkan sistem pemilu liberal yang menitikberatkan pada kekuatan individu Caleg dan menafikan peran partai politik (parpol). Peran parpol hanya sekedar dijadikan kendaraan politik, selebihnya kompetisi dalam pemilu tahun terjadi antar Caleg. Padahal asas sistem pemilu proporsional adalah mengutamakan peran parpol. Seharusnya kompetisi dalam sistem ini adalah kompetisi antar parpol. Konsekuensinya tema dalam kampanye adalah memperdebatkan ide, gagasan, visi, misi dan program parpol. Bukan hanya siasat Caleg untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan mengandalkan uang dan popularitas.

Faktor Penyebab sulitnya pembuktian mengenai kebenaran telah terjadi politik uang sehingga kasusnya tidak sampai ke pengadilan adalah kurang efektifnya peraturan yang mengatur mengenai politik uang sekalipun telah ada undang undang pemilu dimana didalam juga telah terdapat perumusan mengenai politik uang beserta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya, namun dalam pelaksanaanya ternyata masih menghadapi kendala, yaitu mengenai masalah pembuktiannya.

Sosialisasi kepada Masyarakat yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sebagai perguruan tinggi yang bergerak dibidang hukum turut berperan untuk mengsosialisasikan tentang politik uang sebagai wujud nyata membangun kesadaran masyarakat melalui strategi sosialisasi masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk nyata diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk upaya strategis dalam memberitahu Masyarakat mengenai peraturan yang mengatur politik uang.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap sejumlah perwakilan Masyarakat dengan total Masyarakat yang hadir 29 orang di dua tempat yang berbeda dan latar belakang yang berbeda, mulai dari unsur pemuda dan pedagang. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan sosialisasi hukum yang benar terhadap Masyarakat atas praktik politik uang yang beredar di lingkungan Masyarakat.

Masalah yang ingin dipecahkan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh mahasiswa peserta Kawal Pemilu Bersih Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2024, kelompok 21 Kecamatan Payakumbuh Barat. Kecamatan Payakumbuh Barat dengan letak geografis yang berada di pusat kota dan mayoritas penduduk berkerja di sektor perdagangan memiliki potensi yang cukup besar menjadi sasaran calon legislative untuk melakukan praktik politik uang. Sehingga dikhawatirkan hal ini menjadi potensi Masyarakat menerima politik uang dengan alasan ketidaktahuan akan hukum yang dilarang.

MATERI DAN METODE

Materi

Kegiatan Kawal Pemilu Bersih ini mengambil topik Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan tanya

jawab, peserta kegiatan ini terdiri dari masyarakat pemilih pemula dan pedagang yang akan melakukan pemilihan pada tahun ini. Materi yang diberikan yaitu pengetahuan tentang bahaya politik uang, bentuk-bentuk politik uang, sanksi politik uang dan cara pelaporan tindak pidana politik uang.

Metode

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab tentang praktik tindak pidana politik uang. Sebelumnya, kelompok Kawal Pemilu Bersih di Kecamatan Payakumbuh Barat melakukan persiapan dengan melakukan observasi dan survey untuk menilai pemahaman masyarakat tentang politik uang. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami tentang politik uang, sehingga kelompok ini memilih untuk membahas tema yang berkaitan dengan ketidaktahuan tersebut. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 8 dan 13 Februari 2024 di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh 29 orang perwakilan masyarakat. Selama pelaksanaan, masyarakat menunjukkan kurangnya minat terhadap materi sosialisasi karena sudah menganggap praktik politik uang sebagai hal yang lazim untuk mendapatkan keuntungan. Pola pikir ini telah merasuki masyarakat sehingga mereka enggan menyadari bahayanya politik uang. Pada tahap evaluasi dan pelaporan, tim pengabdian akan mengevaluasi pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan dan berupaya meningkatkan hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis 08 Februari 2024 pukul 14.00 WIB dan 13 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di warung kopi kelurahan ibuh dan di SMK Mitra, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi sosialisasi karena dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu dan penyimpangan yang terkait dengan politik uang. Telah diketahui bahwa sosialisasi memainkan dua peran penting dalam kehidupan kita: pertama, sosialisasi memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk memilih, dan kedua, sosialisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial seperti politik uang. Karena tatanan sosial dalam masyarakat yang tidak memiliki sosialisasi hanya dapat bertahan selama satu generasi sebelum akhirnya lenyap. Sosialisasi pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hak mereka untuk memilih pemimpin negara. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak warga negara untuk memilih pemimpin negara. Untuk mengurangi pelanggaran, pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk berintegrasi kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Di Indonesia, pemilu dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Langkah awal dalam kegiatan sosialisasi ini adalah proses observasi dan survei peserta. Selain itu, brainstorming dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab tentang apa itu pemilu, sebelum menyampaikan materi.

Sebelum materi dipresentasikan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan pendapat dan komentar dari para peserta. Hal ini juga dilakukan untuk mengukur pemahaman dasar para peserta mengenai pemilu dan politik uang. Ditemukan bahwa brainstorming ini bermanfaat untuk membuat beberapa peserta penasaran dengan jenis-jenis penyimpangan pemilu yang terjadi. Setelah proses brainstorming selesai, tim mulai menyampaikan materi mengenai politik uang dan pemilihan umum.

Materi yang disampaikan adalah penjelasan tentang peranan hukum dalam mencegah praktek politik uang dan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang. Hukum sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial masyarakat (law asatol of social engineering) artinya melalui hukum kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dapat diarahkan dan diciptakan. Jika demikian adanya, maka keinginan untuk menciptakan institusi partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan bebas dari praktek money politic seharusnya bisa dilakukan dengan cara menciptakan dan membuat peraturan hukum yang mengarah pada tercapainya tujuan tersebut. Secara eksplisit UU Partai Politik telah mengatur mengenai larangan-larangan bagi bagi partai politik Indonesia. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik secara tegas mengatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan (Mooduto & Huda, 2021).

Money politic jelas merupakan sesuatu yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesai. Pada level institusi partai, pelanggaran atas larangan bagi partai untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan akan berakibat pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Partai Politik. Begitu pula Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu secara gamblang melarang adanya praktik money politic ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 280 ayat (1) hurif j Undang-undang pemilu (Chandra & Ghafur, 2020).

Hukum yang menjadi landasan peraturan pemilihan umum di indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia. Pasal pasal terkait pemilihan umum diatur dalam UUD 1945, anatara lain pasal 22E hingga pasal 22H (Salampessy, 2023).

Di sisi lain ternyata banyak kandidat atau calon anggota legislatif dan eksekutif yang sangat membutuhkan sekali suara meraka ketika diadakan pemilihan umum. Dua kepentingan yang kemudian menyatu menjadi satu kepentingan itulah yang kemudian memunculkan adanya praktik politik uang, di sisi lain mungkin bagi masyarakat hal itu dianggap sebagai pendapatan tambahan. Kapan lagi akan memanfaatkan mereka kalau tidak sekarang ini ketika mereka membutuhkanpartisipasi dan sumbangan suara rakyat. Masalahnya kemungkinan lain akan terjadi ketika meraka sudah terpilih baik sebagai anggota DPR atau

DPRD dan bahkan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah ada kecenderungan meraka akan lupa kepada rakyat beserta janji-janjinya ketika kampanye dahulu (Sugiharto, 2021).

Sesi penyampaian materi berikutnya adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic. Tindak Pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Didalam tindak pidana money politic lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana money politic ke kepolisian adalah pengawas tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan) (Solekha, 2020).

Politik Uang adalah praktik yang melanggar hukum di Indonesia, bahkan si penerima bisa menerima hukuman. Praktik Politik Uang tidak hanya masif selama pemilu legislatif tingkat Nasional, tetapi juga menjadi fitur utama kontestasi elektoral ditingkat pemilihan eksekutif didaerah (Muhtadi, 2020).

Dalam melakukan kegiatan penegakan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, Rechtssicherheit atau kepastian hukum, yang melindungi pengadil dari kesalahan Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dalam situasi tertentu, sehingga masyarakat mengharapkan keamanan. Kedua, Zweckmassigkeit atau kemanfaatan, yang menjadi harapan Masyarakat dalam penegakan hukum Karena hukum dibuat untuk manusia, pelaksanaannya harus menguntungkan Masyarakat. Ketiga, Gerechtigkeit atau keadilan, yang harus diterapkan secara komutatif dan tersebar dalam pelaksanaan hokum (Pirmansyah, 2023).

Salah satu kesulitan untuk menghilangkan praktik money politic adalah adanya sifat saling menguntungkan antara si pemberi dan si penerima. Bagi masyarakat yang menerima money politic menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang ”konkrit” yang bisa mereka terima dari para wakilnya. Sikap demikian terjadi karena masyarakat sudah sangat apatis akan realisasi atas janji para calon anggota dewan dalam kampanye yang selalu mengatakan akan bekerja memperbaiki nasib rakyat jika kelak mereka terpilih, namun faktanya selalu bertolak belakang. Sangat sedikitnya realisasi janji para wakil rakyat dalam memperjuangkan nasib rakyat telah menjadi sebab bagi mayoritas rakyat untuk memilih dalam pemilu berdasarkan besaran uang atau barang yang ia terima para kontestan.

Penindakan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa Permasalahan dalam penindakan money politic oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah kesulitan untuk menjerat pelaku money politic, baik pihak yang membagi-bagikan uang/barang maupun pihak yang memberi perintah dan menyuplai uang/barang kepada perantara untuk dibagikan kepada warga. Mekanisme praktik pemberian uang atau materi lainnya tidak secara langsung diberikan oleh caleg atau tim kampanye kepada pemilih sehingga terdapat kesulitan untuk menjerat caleg yang melakukan money politic. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan celah bagi para pelaku money politic pada pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Solekha, 2020).

Menurut Indriyanto Seno Adji walaupun andai kata perbuatan itu secara formil tidak terbukti bersifat melawan hukum, namun secara materil harus dianggap sebagai perbuatan

yang melawan hukum sehingga pelakunya harus tetap dapat diberikan hukuman. Sehubungan dengan pemikiran Indriyanto Seno Adji di atas, maka terdapat tiga hal yang perlu dipertimbangkan mengenai pembuktian dalam kasus politik uang. Pertama yaitu mengenai alat bukti yang bersifat formil bahwa seseorang telah memberikan hadiah ataupun perjanjian kepada orang lain, dan sebaliknya juga dari pihak penerima hadiah ataupun perjanjian, Dalam hal tidak dapat ditemukannya alat bukti formil, misalnya Kwitansi ataupun Surat Tanda Penerimaan suatu barang, hendaknya hal tersebut tidak dijadikan dasar penghapusan pidana bagi seseorang yang telah melakukan politik uang. Pengakuan para saksi di bawah sumpah kiranya dapat dijadikan sebagai alat bukti materil yang menentukan. Hal kedua adalah mengenai orang yang menerima hadiah ataupun perjanjian hendaknya diperlakukan hanya sebatas sebagai saksi di bawah sumpah yang dijamin tidak akan dijadikan tersangka ataupun terdakwa. Apabila para saksi tersebut tidak dijamin bahwa mereka tidak akan dijadikan tersangka/terdakwa, maka terdapat kemungkinan antara mereka yang menerima hadiah ataupun perjanjian dengan orang yang memberi hadiah ataupun perjanjian bersepakat untuk menyangkal terjadinya serah terima hadiah ataupun perjanjian tersebut, sehinnga akan menyulitkan pembuktian. Hal ketiga yang juga sangat penting adalah jaminan dilindunginya para saksi dari ancaman kekerasan yang kemungkinan akan dilakukan oleh pihak pemberi hadiah (Sriyanto, 2003).



Gambar 1.
Pemberian materi sosialisasi

Kegiatan yang bertemakan Problematika Penyelesaian Kasus Politik Uang (Money Politic) ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Diharapkan dengan mengedukasi masyarakat tentang hukum pemilu dan peraturan pemilihan umum UU No. 7 Tahun 2017, masyarakat akan mendapatkan pemahaman tentang pemilu dan dapat menunjukkan frekuensi pelanggaran politik uang serta jenis dan konsekuensi dari politik uang. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang bebas dan adil, diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan fungsinya dengan memberikan perhatian terhadap kuantitas pelanggaran pemilu. Proses sosialisasi Kegiatan pencegahan Tindak Pidana Politik Uang dilakukan dengan metode penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai pemilih perlu mendapatkan perhatian. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, orang tua, dan semua profesi sadar akan bahaya praktik politik uang.



Gambar 2.
Foto Bersama

Masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian ini kemudian akan menjadi masyarakat yang lebih peka dan kontestasi demokrasi dan sekaligus menjadi pengawas partisipatif guna menjadikan pemilua yang berintegritas, mencegah terjadinya politik uang, mendorong pasrtisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas demokrasi dan membentuk karakter serta kesadaran bahaya politik uang kepada masyarakat. Untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita mulia negara demokrasi, masyarakat yang mengikuti penyuluhan ini dapat berperan dalam pengawasan pemilu untuk memberikan informasi mengenai pelanggaran pemilu.

Evaluasi Kegiatan

Beberapa catatan penting yang menjadi evaluasi dari kegiatan sosialisasi ini adalah waktu yang terbatas dan keadaan cuaca pada saat itu hujan deras. Membahas tentang tindak pidana politik uang butuh waktu yang lebih banyak agar bisa dipahami secara maksimal. Selanjutnya keadaan cuaca yang kurang mendukung menyebabkan jumlah masyarakat banyak yang tidak hadir di lokasi.

Tabel 1.
Aktivitas Kegiatan

Pembicara	Materi	Jam
Hanifah Putri Junaedi	Pemilu dan Bahaya Politik Uang	14.10-14.20
Tiara Catur Wulandari	Bentuk dan Sanksi Politik Uang	14.20-14.30
Andini Putri Utami	Motivasi Untuk Memilih	14.30-14.40
Intan Wedia Putri	Pemandu diskusi dan Tanya Jawab	14.40-15.40
Indah Wedia Putri	Penutup dan Kesimpulan	15.40-16.00

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang tindak pidana politik uang di kecamatan payakumbuh barat dapat disimpulkan bawa kegiatan yang dilakukan telah menambah dan meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait betapa sulitnya membuktikan kasus politik uang. Dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap normalisasi praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia sebagai berikut: Pertama, Mayoritas responden mengetahui telah terjadi politik uang, mengetahui bentuk/jenis politik uang, dan mengetahui bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan Pemilu. Responden menganggap bahwa politik uang sudah menjadi budaya di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persepsi responden meliputi faktor pada diri responden (pengalaman responden terkait politik uang); faktor pada sasaran atau objek (kesamaan pengetahun responden tentang praktik politik uang); dan faktor situasi/konteks (politik uang marak terjadi pada saat Pemilu); Kedua, Responden memiliki persepsi yang cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia dan apakah hal tersebut dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahawa masih terdapat responden dengan umur yang relatif lebih muda (di bawah 20 tahun) yang menganggap bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam pemilihan umum di Indonesia meskipun mereka menyadari hal tersebut dapat menciderai integritas pemilihan umum di Indonesia.

Saran Kegiatan Lanjutan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tentang tindak pidana politik uang adalah bagian penting yang telah dilakukan, untuk membantu menekan jumlah tindak pidana politik uang. Mengingat masyarakat merupakan basis pemilih yang masih perlu banyak pemahaman tentang politik uang, maka kegiatan sosialisasi tindak pidana politik uang harus tetap dilakukan dengan mempertimangkan prinsip moralitas dan estetis serta tidak kaku sehingga masyarakat lebih bersedia untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan dengan baik.

Ucapan Terimakasih

Banyak pihak yang berkontribusi dalam kesuksesan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, tim pengabdian mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH, Raju Moh Hazmi, SH.MH selaku Direktur Luhak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, serta Yenny Fitri, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Lapangan. Selain itu, juga kepada Rio Gustriananda, SH selaku Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Ade Hendra selaku Panwascam Kecamatan Payakumbuh Barat, Ul Fikhri, S.Sos selaku Camat Kota Payakumbuh, dan seluruh masyarakat yang telah turut serta dalam kegiatan pengabdian ini.

REFERENSI

Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, *4*(1), 52.

Mooduto, A. M. A., & Huda, U. N. (2021). Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *15*(1), 19–36.

Muhtadi, Burhanuddin. (2020). *Kuasa uang politik uang dalam pemilu pasa orde baru*. PT. Gramedia Jakarta.

Pirmansyah, Redi. (2023). Penegakan hukum pidana pemilu/pilkada elektronik pada pemilu/pilkada serentak 2024. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan,* 5(2), 146.

Solekha, R. R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Legalitas*, *5(1)*, 56.

Salampessy, M. (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*. Cv. Gita Lentera.

Sriyanto, I. (2003). Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1(1), 173.

Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. PT. Nasya Expanding Management

Accepted author version posted online: 4/7/2024
Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING
Sumber Pendanaan Kegiatan Ini Dilakukan Dengan Pendanaan Kelompok Dan Didukung Oleh Program Kawal Pemilu Bersih Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Sumatera Barat.

COMPETING INTERESTS
Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.